

## **BAB II**

### **BUDAYA PENGGUNAAN SENJATA API DI AMERIKA SERIKAT**

#### **2.1 Sejarah penggunaan Senjata Api**

Melihat dari sejarah awal pendirian bangsa, senjata api telah memainkan peranan penting dalam membentuk karakter Amerika. Adanya tradisi berburu, pembentukan milisi, hingga terjadinya perang revolusi merupakan proses-proses penting pembentukan negara yang tidak terlepas dari penggunaan senjata api. Untuk memahami eksistensi senjata api di Amerika yang telah mengakar maka perlu untuk memahami latar belakang sejarah dan budaya yang membuat bangsa ini sangat dekat dengan penggunaan senjata api.

Adapun pada masa yang lalu, Amerika merupakan wilayah baru tanpa tatanan hukum dan pemerintahan. Penghuni pertamanya (*first settlers*) merupakan penduduk Eropa yang mulai bermigrasi pada abad ke-17 untuk mencari lahan baru. Ketika itu mereka harus berhadapan dengan kebuasan daerah baru untuk ditaklukkan, ancaman dari suku asli Indian yang ganas serta serangan binatang buas. Proses kependudukan ini tidak terlepas dari penggunaan senjata api sebagai alat pertahanan diri dari segenap ancaman tersebut. Kemudian pada masa agraris, senjata api menjadi alat untuk berburu sebagai cara utama mendapatkan makanan kegiatan berburu merupakan sebuah tradisi yang ikut membentuk karakter budaya senjata di Amerika. Tradisi ini berkembang secara turun temurun sebagai warisan yang diturunkan oleh kakek kepada cucunya atau ayah kepada putranya yang diikuti dengan kegiatan berburu bersama. Kegiatan ini tidak saja menjadi simbol maskulinitas tetapi juga dimaknai secara spiritual.

Beralih pada abad ke-18 rakyat sipil diberikan hak untuk membawa senjata api, alasannya karena pada masa itu pembentukan tentara khusus dianggap hanya akan menjadi ancaman bagi hak-hak warga sipil. Warga kemudian diberikan mandat

untuk mengangkat senjata sebagai pasukan milisi untuk melindungi diri dan daerah komunalnya dari segala ancaman bahaya musuh, penduduk natif, maupun tentara luar. Milisi beranggotakan para pria di usia produktif dengan menyiapkan sendiri senjata api beserta pelurunya. Senjata api kemudian menjadi lambang kekuatan bangsa ketika pada puncaknya rakyat Amerika mengangkat senjata melawan pemerintahan Inggris yang tiran melalui perang revolusi. Valdez dan Ferguson Jr. (2011) menyatakan

*“1776, the colonies declared independence and went to war with Great Britain. The American Revolution, which ended in 1783, would not have been possible without firearms”*

Sebagai bangsa yang baru terbentuk, para pendiri Amerika bertekad untuk memperluas wilayah kependudukan. Dimulai pada abad ke-19, para pionir melakukan ekspansi ke barat yang disebut dengan gerakan *Westward Expansion*. Gerakan ini berupa penjelajahan dan penguasaan wilayah barat benua Amerika dengan tujuan untuk membangun koloni-koloni. Hasil dari penerapan konsep tersebut adalah takluknya daerah-daerah yang sekarang dikenal dengan Texas, Mexico, dan Massachusetts.

Perluasan ini banyak diilhami dari naskah *“Manifest Destiny”* 1839 yang berisi pemikiran dan keyakinan bahwa Amerika merupakan bangsa yang memiliki nilai-nilai agung yang bersifat universal sehingga menjadi bangsa yang ditakdirkan Tuhan untuk menjalankan misi kemanusiaan, menyebarkan nilai dan asas kebangsaan Amerika di dunia, termasuk untuk memperluas daerah kekuasaan (O’Sullivan, 1839). Doktrin inilah yang digaungkan oleh para pelopor bangsa Amerika dalam menjalankan misinya. Proses ekspansi ke barat yang memakan waktu panjang ini juga merupakan bagian penting dalam pengukuhan makna senjata api sebagai simbol kekuatan bangsa menjadi alat yang mengawal penaklukan wilayah baru, meskipun harus dilakukan dengan gencatan senjata api melalui sejumlah peperangan.

Dimulai dari Kentucky, yang berhasil meloloskan undang-undang pertama yang disusun untuk mengendalikan praktek membawa senjata tersembunyi di tahun

1813 (Cornell, 2006). Sedangkan, Louisiana mengeluarkan undang-undang yang lebih komprehensif melarang senjata tersembunyi untuk membendung kasus-kasus pembunuhan yang belakangan sering terjadi. Masalah senjata tersembunyi merupakan masalah yang akut terjadi di daerah selatan.

Hak membawa senjata tersembunyi bagi Clinton bukan sebagai kebebasan fundamental atau hak Konstitusi. Clinton menganggap praktek tersebut sebagai ancaman bagi kebebasan publik yang merupakan hak fundamental yang perlu dilindungi oleh pemerintah karena sudah menjadi hak warga untuk menikmati kebebasannya tanpa rasa takut yang diciptakan oleh senjata tersembunyi. Pada dekade-dekade berikutnya, Indiana, Georgia, Virginia, Alabama, dan Ohio ikut mengadopsi hukum tersebut.

Hukum pelarangan senjata tersembunyi pertama terjadi dalam periode antara tahun 1813 dan 1859 yang secara mendasar mencakup pembatasan waktu, tempat dan perilaku. Selanjutnya pada gelombang kedua hukum yang diciptakan lebih keras mengatur pelarangan penjualan dan pemilikan jenis senjata tertentu. Tahun 1837 Alabama melarang penggunaan pisau bowie, Georgia dan Tennessee mengikuti dengan hukum yang lebih luas melarang penjualan pistol, pisau belati, dan tongkat pedang. Akan tetapi, pada saat negara bagian lain berusaha memperketat regulasi senjata api, di saat yang sama juga negara bagian lainnya semakin mempertegas Konstitusi mereka dengan menyatakan bahwa hak membawa senjata adalah hak individu untuk perlindungan diri (Cornell, 2006).

Satu tahun kemudian Connecticut menggunakan Mississippi sebagai model dalam klausa barunya terkait hak membawa senjata api. Sedangkan Konstitusi Utah mencakup tujuan yang lebih luas terkait hak senjata api, tidak saja hanya untuk perlindungan diri dan keluarga tetapi juga tanggung jawab bela negara (*Spitzer, 2009*). Dalam praktiknya, terdapat 34 klausa negara bagian merujuk pada hak kolektif atau didasarkan hak milisia yang mengacu pada pertahanan negara, sedangkan 28 negara bagian merujuk pada hak personal atau individual. Di antaranya, juga terdapat 6

negara bagian yang memasukkan perlindungan untuk berburu dan aktivitas rekreasi (Spitzer, 2009). Dengan demikian setiap negara bagian memiliki pandangannya sendiri terkait hak senjata api yang dikukuhkan lewat konstitusinya masing-masing.

### **2.1.1 Senjata Api pada Era kepemimpinan Andrew Jackson**

Sebuah hukum larangan federal diperkenalkan pada tahun 1920-an untuk jenis pembelian senjata api melalui pesanan pos. Kemudian merebaknya tindakan kekerasan oleh gengster selama tahun-tahun pelarangan alkohol memicu penyusunan hukum federal The National Firearms Act tahun 1934 dan The Federal Firearms Act tahun 1938 yang melarang kepemilikan pribadi senjata api mesin dan regulasi transfer senjata api antarnegara bagian (Squires, 2000). Bagian pertama dari undang-undang kontrol senjata nasional disahkan pada 26 Juni 1934. NFA merupakan bagian dari “Perjanjian Baru untuk Kejahatan” yang digaungkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt dan dimaksudkan untuk mengurangi kejahatan geng pada zaman itu seperti kasus Pembantaian St. Valentine's Day. Dalam sidang tersebut berhasil mengeluarkan beberapa produk hukum baru yang sama-sama disepakati, salah satunya adalah NFA yang mengenakan pajak pada pembuatan, penjualan, dan pengangkutan senjata api yang tercantum dalam undang-undang, di antaranya senapan laras pendek dan senapan, senapan mesin, muffler dan peredam senjata api. Karena cacat konstitusional, produk hukum NFA dimodifikasi beberapa kali. Pajak \$ 200, yang tinggi untuk era itu, diberlakukan untuk mengurangi transfer senjata-senjata ini. Federal Firearms Act (FFA) tahun 1938 mengharuskan produsen, importir, dan *dealer* senjata untuk mendapatkan lisensi senjata api federal. FFA dicabut pada tahun 1968 oleh Gun Control Act (GCA), meskipun banyak ketentuannya diaktifkan kembali oleh GCA. Regulasi federal ini kemudian diikuti dengan aktivitas kontrol senjata api di negara bagian dan lokal sebagai reaksi terhadap angka kejahatan senjata pada masa itu.

Hak dalam kepemilikan senjata api semakin kokoh posisinya di masa individualisme baru Amerika. Di tahun 1830-an pada masa kepemimpinan Andrew

Jackson atau disebut era Jaksonian, kebebasan individu sangat diagungkan. Hal ini di satu sisi memberi dampak pada penginterpretasian hak senjata api yang semakin menguatkan hak tersebut sebagai hak warga sipil, dengan berbagai alasan untuk perlindungan diri, kegemaran berburu yang kemudian berkembang menjadi aktivitas olahraga. Padangan ini terutama dipicu oleh naskah “Democracy in America” yang dipublikasikan oleh Alexis de Tocqueville sebagai hasil pengamatannya terhadap kehidupan masyarakat Amerika (Cornell, 2006).

Pada era tersebut Amerika berada dalam posisi transisi, dimana terdapat pertentangan tantangan antara nilai tradisional Republikan yang berdampak pada pandangan hukum terkait hak membawa senjata, dan pertahanan diri. Hal ini tampak pada praktek ketika beraktivitas dan mempersenjatai diri dengan senjata tersembunyi (concealed weapons). Beberapa pengamat sosial mengidentifikasi awal mula praktek ini dengan kecenderungan kekerasan pada budaya daerah selatan. Penyebaran pistol dan pisau pada masa ini menyebabkan peningkatan dalam jumlah kekerasan kolektif, ketika beberapa kelompok menjadi sasaran utamanya karena dianggap sebagai kelompok luar masyarakat Amerika yaitu kelompok Afrika-Amerika, para budak, mormon dan penganut Katolik. Senjata api memainkan peran utama dalam pembunuhan massal di era ini. Dengan berkembangnya level kekerasan antarorang, mendorong gerakan untuk meregulasi kebijakan kontrol senjata secara lebih komprehensif, akan tetapi di satu sisi gerakan ini memicu kesadaran publik akan ideologi hak senjata api secara konstitusional, sebagai hak individu untuk perlindungan diri.

*The enactment of these early gun control statutes prompted a back-lash that produced the first systematic defense of an individual right to bear arms in self-defense. America's first gun violence problem not only occasioned the first efforts at gun control, it also helped crystallize a new gun rights ideology (Cornell, 2006).*

Berdasarkan pemikiran yang muncul pada era Presiden Jackson tersebut selanjutnya memperkuat interpretasi hak penggunaan senjata api dalam Amandemen Kedua sebagai hak individu. Meskipun begitu, ideologi tersebut tidak semata diterima oleh kelompok oposan. Bentrokan pendapat kedua kubu yang bertentangan

terus terjadi dengan mengandalkan kekuatan lobi dan argumen yang ajek sehingga ikut menentukan perkembangan regulasi kontrol senjata api selanjutnya.

### **2.1.2 Senjata Api pada Era Kepemimpinan Lyndon Johnson**

Lyndon B. Johnson merupakan presiden Amerika ke-36 yang resmi menjabat dari 1963 hingga 1969. Selama masa kepemimpinannya, tidak terdapat peraturan baru yang menyangkut kepemilikan senjata api dalam beberapa dekade hingga terjadinya pembunuhan Presiden Kennedy. Presiden Lyndon mendesak pengajuan beberapa undang-undang kontrol senjata api kepada Kongres. Perdebatan terus berlanjut antara kedua kubu pro dan kontra senjata api yang menuntun pada kebuntuan keputusan. Pada 1965 Presiden Johnson secara aktif mendukung kontrol senjata api dengan memelopori tindakan kontrol senjata baru yang lebih ketat dan memperkenalkannya kepada Senat. Tetapi proposal RUU Presiden Johnson mengalami kegagalan karena tekanan berat dari NRA, para pemimpin kongres yang pro kepemilikan senjata api, juga importir senjata, pabrik, dan *dealer*.

Pada 1963, Presiden Kennedy ditembak dan dibunuh dengan senapan yang dipesan melalui *Mail Order* majalah *American Rifleman*. Kongres mengajukan larangan penjualan senjata api melalui pos dan *Home Shopping*, namun tetap tidak ada undang-undang yang disahkan sampai tahun 1968. Sebelumnya, RUU Pengendalian Senjata api yang diajukan oleh Senat adalah *Senate Bill 1975* yang rilis pada tahun 1963, yaitu "A Bill to Regulate the Interstate Shipment of Firearms" dan *Senate Bill 1592* pada tahun 1965 "A Bill to Amend the Federal Firearms Act of 1938"(Gerney & Parsons, 2014). Keduanya diperkenalkan oleh Senator Thomas J. Dodd dan berhasil mendorong untuk disahkannya *The Gun Control Act 1968*. Kematian Martin Luther King Jr pada bulan April 1968 dan Senator A. Robert F. Kennedy pada bulan Juni 1968 mendorong Presiden Lyndon B. Johnson untuk mengubah sikap masyarakat terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata dengan mengesahkan RUU Gun Control Act 1968 yang dianggap sangat kontroversial, karena berhasil memicu perdebatan antar kubu pro dan kontra. *The Gun Control Act* menempuh jalan yang cukup berbelit-belit sebelum persetujuan akhir dari Kongres.(Bugliosi, 2007) Pada

tahun 1963 ketika Senator Thomas J. Dodd, seorang Demokrat dari Connecticut, memperjuangkan undang-undang yang ditujukan khusus untuk memperketat pembatasan penjualan senjata api pesanan melalui pos. Setelah Presiden Kennedy dibunuh dengan senapan yang diperoleh melalui pos (*Home Shopping*), Senator Dodd memperluas jangkauan undang-undang dengan mengikutsertakan jenis senjata laras panjang. Namun, Undang-undang tersebut gagal diloloskan ketika diajukan ke Komite Perdagangan dan tidak diizinkan untuk diadakan pemungutan suara oleh Senat. NRA mengkritik RUU tersebut sebagai keputusan yang tidak rasional, dan lewat media *The Rifleman* NRA memprovokasi masyarakat untuk melayangkan protes dalam bentuk surat ke Kongres.(Michaud,2012)

Pada 1968, Presiden Johnson dan jajarannya menggencarkan upaya mereka dalam mengesahkan *The Gun Control Act*. Presiden Johnson menekan dan menuntut Kongres di depan masyarakat umum untuk memberlakukan kebijakan pengendalian senjatanya. Dalam pidato *State of the Union 1968*, Johnson mendesak Kongres untuk mengesahkan undang-undang kontrol senjata yang akan menghentikan “Mail Order Murder”(Michaud, 2012) dan menyampaikan kepada Kongres soal mendesaknya untuk meloloskan undang-undang kejahatan yang mengharuskan pendataan nasional setiap senjata di Amerika dan lisensi untuk semua pemilik senjata api. Setelah melewati masa pertimbangan 9 hari oleh komite, *House Resolution 17735* yang dikenal sebagai *The Gun Control Act* akhirnya ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Lyndon B. Johnson pada 22 Oktober 1968. *The Gun Control Act* berisi pelarangan penjualan senapan melalui pos atau *Home Shopping* dan melarang pengguna narkoba, anak kecil, juga orang-orang yang termasuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Narapidana yang pernah dihukum melebihi satu tahun penjara
2. Pelaku kejahatan yang termasuk dalam daftar buron
3. Pengguna zat-zat terlarang sebagaimana diatur dalam pasal 102 *The Controlled Substances Act*.

4. Orang yang telah diputuskan cacat mental atau telah berobat ke institusi penanganan kesehatan mental.
5. Orang asing yang masuk AS secara ilegal.
6. Orang yang diberhentikan Angkatan Bersenjata dalam kondisi yang tidak terhormat.
7. Orang yang telah menanggalkan kewarganegaraan AS.
8. Orang yang dalam perintah pengadilan untuk menahan diri dari upaya melecehkan, menguntit, atau mengancam pasangan atau anak.
9. Orang yang telah dihukum karena kejahatan pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga.(Gerney & Parsons, 2014).

The *Gun Control Act* juga memperkuat persyaratan perizinan dan *Background Check* untuk para pedagang senjata yang luput dari perhatian karena sebelumnya para pedagang senjata tidak diawasi secara ketat oleh negara(Ontheissues.org, 2018).

### **2.1.3 Senjata Api pada Era Kepemimpinan Ronald Reagan**

Hingga saat ini Presiden ke-40, Ronald Reagan merupakan seorang presiden yang sangat diagung-agungkan oleh masyarakat Amerika terutama para pendukung Amandemen Kedua, dan banyak di antara kaum konservatif Amerika yang menganggap Reagan sebagai lambang konservatisme modern. Pada masa kepresidenannya Reagan berhasil mencanangkan sebuah regulasi dalam kepemilikan senjata api yang disebut sebagai *Brady Bill 1993* dan *Assault Weapons Ban 1994*(Cornell, 2006).

Ronald Reagan memasuki kampanye presiden pada tahun 1980 dengan dikenal sebagai pendukung hak Amandemen Kedua terkhususnya dalam kepemilikan senjata api. Undang-Undang Kontrol Senjata 1968 masih merupakan masalah yang relatif baru, pasalnya, seorang Jaksa Agung AS Edward H. Levi telah mengusulkan pelarangan senjata di daerah-daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Sebuah



media yang terfokus membahas soal senjata api “Guns and Ammo” meliput bahwa Presiden Reagan mengutarakan keraguan pada pendiriannya pada Amandemen Kedua, ia mengatakan bahwa perundang-undangan untuk melarang atau menyita senjata ialah hal yang tidak realistis untuk kondisi masyarakat Amerika saat ini. Presiden Reagan mengutarakan hal tersebut dengan adanya pertimbangan bahwa menurutnya kejahatan dengan kekerasan tidak akan pernah bisa dihilangkan, dengan atau tanpa kendali senjata (gun control), dan menurutnya upaya untuk mengekang kejahatan harus ditujukan kepada mereka yang menyalahgunakan senjata. Perdebatan mengenai kepemilikan senjata api tidak berhenti sampai disitu (Gerney & Parsons, 2014). Di kesempatan lain Presiden Reagan juga mengatakan bahwa amandemen kedua menyisakan sedikit kelonggaran bagi advokat pengontrol senjata, karena hak warga negara untuk memegang dan memanggul senjata tidak boleh dilanggar jika kebebasan dan hak-hak individu di Amerika ingin selamat.

Satu-satunya perundang-undangan yang melindungi pemilik terkait dengan hak senjata selama pemerintahan Reagan adalah Undang-Undang Perlindungan Pemilik Senjata Api tahun 1986. Ditandatangani oleh Reagan pada 19 Mei 1986, dan undang-undang tersebut merevisi Undang-Undang Pengendalian Pistol yang pada awalnya muncul ke publik pada tahun 1968 (Reagan, 1991). National Rifle Association dan kelompok pendukung senjata api lainnya terus mendesak untuk meloloskan undang-undang tersebut karena dianggap menguntungkan bagi pemilik senjata. Undang-undang tersebut akan mempermudah pengangkutan senapan panjang ke seluruh Amerika Serikat, yang mana akan menguntungkan para penjual senjata api dalam sisi logistik dan melarang penuntutan terhadap seseorang yang akan melewati daerah-daerah antar wilayah negara bagian dengan peraturan kontrol senjata api yang lebih ketat. (Coleman, 2016)

Sebelum Reagan lepas dari jabatannya sebagai Presiden Amerika pada Januari 1989, Kongres melakukan upaya untuk meloloskan undang-undang *Background Check* untuk pembelian senjata api. RUU Brady, diambil dari nama Sarah Brady, istri mantan sekretaris pers Presiden Reagan, Jim Brady, yang terluka dalam upaya

pembunuhan terhadap presiden tahun 1981(Squires, 2000). Brady Bill pada awalnya terus berjuang untuk mendapatkan dukungan di Kongres, namun undang-undang tersebut gagal karena tidak mendapat dukungan dari Presiden penerusnya, yaitu George H.W. Bush. Media New York Times mengutip statistik yang menunjukkan bahwa 9.200 pembunuhan dilakukan setiap tahun di Amerika Serikat dengan menggunakan pistol, Presiden Reagan masih menyuarakan dukungannya untuk Brady Bill, dengan mengatakan bahwa upaya pembunuhan Presiden Reagan pada 1981 mungkin tidak akan pernah terjadi jika Brady Bill saat itu telah disahkan dan didukung oleh segala pihak(Reagan, 1991). Pada 1993, Kongres telah meloloskan RUU Brady Bill dan masuk dalam tahap pelolosan RUU larangan senjata serbu (Assault Weapons). Reagan bergabung dengan mantan Presiden Gerald Ford dan Jimmy Carter dalam menyuarakan RUU larangan penggunaan senjata serbu dengan mengirim surat kepada Kongres, yang menyatakan urgensi dalam pembatasan dan kontrol penggunaan *Assault Weapons* ialah sangat mendesak harus diloloskan. Hingga pada 1994 akhirnya RUU mengenai *Assault Weapons* diloloskan dan mulai di implementasikan.

Sikap Ronald Reagan dalam kontrol senjata selama bertahun-tahun menjadikannya seorang presiden yang sangat mendukung Amandemen Kedua, namun tetap menjadi seseorang yang mengedepankan Hak Asasi Manusia dan keselamatan masyarakat Amerika diatas politik.

#### **2.1.4 Senjata Api pada Era kepemimpinan Bill Clinton**

Bill Clinton merupakan Presiden Amerika ke-43 yang menjabat secara resmi pada 1993 hingga 2001. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Bill Clinton termasuk kebijakan yang berkonsentrasi pada prodak hukum dan HAM. Beberapa misi penting Bill Clinton yang diturunkan atau belum diselesaikan oleh Presiden Ronald Reagan adalah soal kontrol senjata api. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Bill Clinton dianggap berhasil melakukan perubahan signifikan dalam politik presidensial Demokrat di Amerika Serikat. Clinton, seorang gubernur asal Arkansas yang berhasil mengalahkan seorang Republikan George H.W. Bush dalam

pemilu 1992, menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat yang memiliki program pengetatan undang-undang kontrol senjata api (Spitzer, 2009). Berangkat dari pemimpin sebelumnya yaitu, Lyndon B. Johnson, yang menjadikan pengendalian senjata sebagai titik fokus pemerintahannya yang kala itu sedang mengambil alih kepresidenan setelah Presiden John F. Kennedy dibunuh.

Salah satu program Presiden Clinton dalam mengontrol senjata api ialah Brady Bill. Pertama kali diperkenalkan pada 1987, Brady Bill merupakan program yang sebelumnya diajukan oleh Presiden Ronald Reagan kepada Kongres. Presiden Reagan mengajukan Brady Bill yang mulanya berangkat dari keresahannya atas kasus pembunuhan yang terjadi karena masyarakat terlalu bebas untuk memiliki senjata api tanpa ada batasan dan dijual dengan sangat bebas. Setelah mengalahkan Bush pada November 1992, Presiden Clinton mendorong kongres untuk mengesahkan RUU Brady Bill, dengan menyatakan bahwa ia akan segera menandatangani jika kongres telah meloloskannya (Mark, 1993). Setelah Kongres melakukan diskusi panjang, mayoritas anggota Kongres pada saat itu menunjukkan mendukung RUU tersebut. Dalam beberapa bulan perdebatan, awak Gedung Putih telah mendesak kongres untuk membuat anggota Partai Republikan di kedua majelis mendukung RUU tersebut. Namun, pada akhirnya RUU ini berhasil melewati kedua kubu dan ditandatangani menjadi undang-undang pada 30 November 1993, dalam kurun waktu tepat satu tahun semenjak ia diangkat menjadi Presiden (Spitzer, 2009).

Poin utama dari Brady Bill adalah mewajibkan adanya masa tunggu selama 5 (lima) hari setelah pembelian senjata api dan mengharuskan aparat hukum setempat untuk melakukan *Background Check* pada pembeli senjata api. Presiden Clinton menganggap Background Check adalah hal penting yang harus dicermati. Dikutip dari Autobiografinya, Presiden Clinton pernah berdialog dengan seorang senator dari Arkansas yang menceritakan bahwa ada sebuah kasus pembunuhan keji yang melibatkan seorang Veteran perang Vietnam yang kondisi mentalnya sudah tidak stabil, dan ia melakukan penembakan kepada seorang Dokter Hewan karena tidak sanggup mengobati hewan peliharaannya (Clinton, 2005)

Didorong oleh kesuksesannya dalam mengesahkan UU Brady, Clinton selanjutnya memfokuskan dirinya pada larangan senjata serbu atau *Assault Weapons*. Pelarangan ini ditargetkan pada senjata semi-otomatis yang memiliki karakteristik seperti senjata militer, seperti AK-47 dan senapan *Assault Rifle*. Satu tahun setelah menandatangani Undang-Undang Brady, Presiden Clinton juga berhasil mengesahkan RUU Tindak Pidana 1994, yang mencakup Undang-Undang Perlindungan Keamanan Penggunaan Senjata Api, Keamanan Publik, dan Rekreasi yang umumnya dikenal sebagai *Federal Assault Weapon Ban*. Undang-undang tersebut melarang pembuatan, pemindahan, atau kepemilikan *Automatic Assault Weapons*. Undang-undang tersebut juga melarang pembuatan *Large Capacity Ammunition Feeding Devices (LCAFD)*, dengan pengecualian untuk penjualan senjata api tersebut kepada pemerintah, penegak hukum atau militer (Spitzer, 2009).

Meskipun masa kepemimpinan Bill Clinton resmi selesai pada tahun 2001, pada 2007 silam sebagian dari RUU Brady dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Masalah yang sama juga terjadi pada undang-undang *Assault Weapons Ban* yang pada akhirnya resmi berakhir karena Kongres gagal untuk memperpanjang dan menjadikan undang-undang tersebut bersifat permanen. George W. Bush selaku presiden setelah Bill Clinton pun memilih untuk tidak memperpanjang undang-undang tersebut.

Dalam masa kepemimpinan Bill Clinton, Amerika telah mencanangkan untuk meratifikasi sebuah konvensi yang mengatur tentang kepemilikan senjata api, yaitu *Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials* atau yang dikenal dengan CIFTA. CIFTA merupakan konvensi yang muncul dari OAS (Organization of American States) yaitu sebuah organisasi yang beranggotakan oleh seluruh Negara di benua Amerika. OAS sendiri sudah terbentuk pada 1948 dan tercatat memiliki 35 anggota termasuk Amerika Serikat sebagai pusat organisasi tersebut(OAS.ORG). Pada 1997, OAS telah berhasil merumuskan CIFTA sebagai konvensi yang mengatur

soal senjata api. CIFTA banyak mengatur soal *Illicit Manufacturing*<sup>3</sup>, *Illicit Trafficking*<sup>4</sup>, *Firearms*<sup>5</sup>, *Ammunition*<sup>6</sup>, *Explosives*<sup>7</sup>, *Other related materials*<sup>8</sup>, dan *Controlled Delivery*<sup>9</sup>(OAS.ORG). CIFTA menekankan adanya otorisasi dalam kegiatan ekspor, impor, dan distribusi senjata api antar Negara anggota, juga CIFTA berfungsi untuk sarana bertukar informasi, kooperasi, dan pengalaman antar Negara anggota. Dalam kinerjanya, CIFTA dinilai dapat mengontrol soal kepemilikan senjata api dan proses distribusinya, namun, ketika berlanjut memasuki rezim kepemimpinan Barack Obama, CIFTA mulai menuai pro dan kontra. Pasalnya, masyarakat modern menilai konvensi soal senjata api tersebut telah melanggar kebebasan masyarakat dalam memiliki senjata api berdasarkan amandemen ke-2 Amerika Serikat.

### **2.1.5 Senjata Api pada Era kepemimpinan Barack Obama**

Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama merupakan Presiden dari partai Demokrat yang menjabat selama dua periode terhitung sejak 2009 hingga 2017, dan juga merupakan seorang *African-American* pertama yang menjabat sebagai Presiden. Presiden Obama terkenal dengan karakternya yang ramah, bijak, dan emosional. Pada tahun 2005 hingga 2008, Barack Obama sempat menjabat sebagai seorang Senator negara bagian Illinois, Obama mendukung larangan penjualan semua bentuk senjata api *semi-Automatic*, dan mengetatkan pembatasan dalam pembelian senjata api. Sebagai Senator Illinois, ia menentang peraturan tahun 2004 yang memungkinkan adanya pembelaan diri bagi mereka yang dituduh melanggar undang-undang setempat yang membuatnya melanggar hukum jika orang-orang tersebut

---

<sup>3</sup> Produksi secara ilegal senjata api yang tidak memiliki izin oleh pemerintah *negara anggota*, yang termasuk proses perakitan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan material lainnya.

<sup>4</sup> Termasuk kegiatan Ekspor, Impor, Akuisisi, Penjualan, distribusi, mobilitas, atau pemindahan senjata api termasuk amunisi, bahan peledak, dan material lainnya yang tidak memiliki izin untuk masuk kedalam teritori Negara *State Party* lainnya.

<sup>5</sup> Segala bentuk senjata api dengan peluru yang dapat memantik ledakan, termasuk bentuk lainnya seperti granat, misil, ataupun ranjau.

<sup>6</sup> Segala bentuk dari amunisi termasuk peluru, bubuk peledak, tempat peluru, dan lainnya.

<sup>7</sup> Segala bentuk material dan substansi yang dapat memantik ledakan.

<sup>8</sup> Segala bentuk material penunjang senjata api termasuk aksesoris atau bentuk penunjang lainnya.

<sup>9</sup> Segala bentuk teknis dalam pengiriman dan distribusi senjata api antara Negara *State Party*.

memiliki senjata api. Sejak tahun 1994 hingga 2002, Obama adalah anggota dewan dari *Joyce Foundation*, yang menyediakan dana untuk organisasi-organisasi pengontrol senjata di Amerika Serikat.

Obama telah mendukung beberapa langkah pengendalian senjata, termasuk otorisasi ulang *Federal Assault Weapons Ban* yang sebelumnya diinisiasi oleh Presiden Reagan dan setelahnya ditangguhkan kembali oleh Presiden Clinton. Pada konferensi pers 15 Februari 2008 lalu, Obama menyatakan,

*"I think there is an individual right to bear arms, but it's subject to commonsense regulation."*, ([Obamawhitehouse.archive.gov](http://Obamawhitehouse.archive.gov))

yang berarti Obama juga telah menyatakan penentangannya untuk mengizinkan warga negara Amerika membawa senjata api tersembunyi (*Concealed Weapons*) dan mendukung undang-undang nasional yang melarang praktik tersebut.

Setelah terpilih sebagai Presiden, Obama semakin memposisikan dirinya sebagai pendukung Amandemen Kedua, dan tetap memprioritaskan untuk menjauhkan senjata api dari anak-anak dan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Dalam pidato kepresidenannya, Obama pernah menyatakan rasa hormatnya terhadap hak-hak yang tertuang dalam Amandemen Kedua,

*"I believe in the Second Amendment, there written on paper, that guarantees the right to bear arms. No matter how many times people try to twist my words around, I taught constitutional law. I know a little bit about this. But I also believe that we can find ways to reduce gun violence consistent with the Second Amendment."*([CNBC.com](http://CNBC.com))

Dalam masa pemerintahannya, Obama berhasil mengubah sikap Amerika Serikat dalam menerima usulan perjanjian PBB tentang perdagangan senjata kecil, dan mendukung perjanjian itu disahkan oleh anggota PBB lainnya. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa negara-negara anggota yang menandatangani diharuskan memiliki standar internasional untuk impor, ekspor, dan pengalihan senjata api untuk mencegah pengalihan senjata api dari pasar legal ke pasar gelap(New York Times, 2013). Meskipun banyak klaim yang bertentangan, namun menurut Obama perjanjian itu tidak akan membatasi hak Amandemen Kedua warga

Amerika karena tetap mengakui adanya hak Negara untuk mengatur transfer senjata internal dan kepemilikan nasional, termasuk melalui perlindungan konstitusi nasional atas kepemilikan pribadi, secara eksklusif di dalam wilayah Negara.

Pada 16 Januari 2013, satu bulan setelah penembakan Sekolah Dasar Sandy Hook, Presiden Obama mengajukan serangkaian proposal pengendalian senjata api dan mendesak Kongres untuk menegaskan kembali larangan yang sudah tidak berlaku pada senjata golongan *Assault Weapons*, yaitu jenis senjata api yang digunakan dalam beberapa penembakan massal. Presiden Obama telah meluncurkan serangkaian rencana untuk mengatasi kekerasan senjata di Amerika. Inisiatif ini terdiri dari 23 tindakan eksekutif dan tiga memorandum presiden, yang sebagian besar membutuhkan persetujuan dari Kongres. Rencana yang diajukan oleh Presiden Obama tercantum sebagai berikut:

1. Memprketat pemeriksaan latar belakang untuk semua penjualan senjat, termasuk penjual dan pembeli. Termasuk pengecekan data asuransi kesehatan sehingga negara dapat menggali informasi tentang kesehatan mental sang pembeli senjata.
2. Memberikan negara-negara bagian dana insentif untuk membuka penelitian yang meneliti catatan sejarah kriminal dan orang-orang yang dilarang memiliki senjata api karena alasan kesehatan mental.
3. Larangan senjata *Assault Weapons* dan membatasi *Magazine* hingga kapasitas *10 Round*.
4. Penyediaan alat tambahan untuk penegakan hukum dengan mengusulkan tindakan keras terhadap perdagangan senjata illegal dan menetapkan hukuman ketat bagi penjual yang lulus pemeriksaan latar belakang namun kemudian menjual senjata tersebut kepada orang-orang yang dilarang (teroris, penjahat, dan sebagainya).
5. Mendesak Kongres untuk mengesahkan proposal pemerintah senilai \$4 miliar untuk meprakarsai 15.000 petugas polisi disetiap negara bagian untuk membantu mencegah kejahatan senjata api.

6. Memaksimalkan upaya untuk mencegah kekerasan senjata dan menuntut pelaku kejahatan senjata api. Obama meminta jaksa agung untuk bekerjasama dengan seluruh pengacara di Amerika.
7. Memberikan pelatihan untuk situasi baku tembak kepada 14.000 personel penegak hukum dan pejabat sekolah.
8. Mengarahkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk mengeluarkan pernyataan kepada penyedia layanan kesehatan, bahwa mereka tidak dilarang oleh hukum federal untuk melaporkan ancaman kekerasan kepada pihak yang berwenang.
9. Meluncurkan kampanye keamanan senjata nasional untuk mendorong kepemilikan senjata yang bertanggung jawab dan memberi wewenang kepada Komisi Keamanan Produk Konsumen untuk memeriksa masalah teknis terkait dengan *Gun Safety-Lock*.
10. Membantu sekolah meningkatkan kesadaran dalam keamanan.
11. Meningkatkan kesadaran kesehatan mental melalui peningkatan pelatihan guru dan pelatihan 5.000 tenaga psikolog profesional. Rencana tersebut juga termasuk perlindungan dan perawatan kesehatan mental yang dijamin di bawah Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau serta Undang-Undang Kesetaraan dan Kesetaraan Kesehatan Mental tahun 2008.(Jackie, 2013)

Tidak lama setelah Obama mengajukan proposal tersebut, NRA (National Riffle Assosiation) merespon dengan melawan langkah Obama, juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Partai Republik, Paul Ryan, mengatakan rencana itu pasti akan ditentang di pengadilan. Kedua kubu tersebut menentang proposal obama dengan alasan yang sama, yaitu proposal tersebut dinilai akan mengekang kebebasan masyarakat dalam memiliki senjata api dan dinilai sangat tidak menghormati Amandemen Kedua. Menurut Kongres, kekerasan senjata secara signifikan lebih tinggi di Amerika dibandingkan negara-negara maju lainnya, menewaskan sekitar 30.000 orang setiap tahun. Namun pada saat itu Kongres enggan mengesahkan



undang-undang apa pun yang membatasi kepemilikan senjata dan menghadapi tekanan dari kubu NRA.

Pada 24 Januari 2013, Senator Dianne Feinstein dan 24 anggota dari partai Demokrat memperkenalkan *Assault Weapons Ban of 2013* (AWB 2013). Peraturan soal kontrol senjata ini mirip dengan larangan federal 1994 yang sebelumnya sudah diajukan oleh Presiden Reagan, namun, beberapa pasal tambahan yang diajukan oleh Obama lebih berkonsentrasi pada:

1. Penjualan, pemindahan (transfer), impor, atau pembuatan senjata api
2. Senjata api dengan *Thumbhole Stocks* dan *Bullet Button*
3. Impor senjata serbu dan majalah berkapasitas besar
4. Senjata api dengan amunisi berkapasitas besar (lebih dari 10 peluru)

14 Maret 2013, *Senate Judiciary Committee* menyetujui RUU tersebut. Namun, pada 17 April 2013, RUU itu gagal terkabulkan dalam pemungutan suara dalam *Chamber* dengan anggota 100 orang, yang mana banyak anggota yang menolak RUU tersebut terutama para Republikan. (Jackie, 2013)

*. . . Second Amendment rights are important, but there are other rights that we care about as well. And we have to be able to balance them. Because our right to worship freely and safely -- that right was denied to Christians in Charleston, South Carolina. And that was denied Jews in Kansas City. And that was denied Muslims in Chapel Hill, and Sikhs in Oak Creek. They had rights, too. Our right to peaceful assembly -- that right was robbed from moviegoers in Aurora and Lafayette. Our unalienable right to life, and liberty, and the pursuit of happiness -- those rights were stripped from college students in Blacksburg and Santa Barbara, and from high schoolers at Columbine, and from first-graders in Newtown. First-graders. And from every family who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun. (Obama, 2016)*

Pada 5 Januari 2016, Presiden Obama meluncurkan strategi barunya untuk mengurangi kekerasan senjata api di Amerika. Usulannya fokus pada persyaratan pemeriksaan latar belakang (*Background Check*) yang akan meningkatkan efektivitas *National Instant Criminal Background Check System* (NICS), dan edukasi mengenai

senjata api yang lebih besar, bersamaan dengan upaya penegakan hukum yang ada di tingkat negara bagian(NCSL.org).

Presiden Obama akan mengarahkan *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives* (ATF) untuk mewajibkan segala bentuk bisnis yang terlibat dalam penjualan senjata untuk memiliki izin federal dan melakukan *Background Check*. Persyaratan ini berlaku untuk segala toko senjata, kongsi penjual senjata, dan penjual senjata di Internet. Persyaratan lisensi berlaku untuk semua penjual yang terlibat dalam bisnis penjualan senjata, tanpa melihat dari seberapa sering atau berapa banyak transaksi jual-beli yang ada. Presiden Obama juga membebaskan sanksi kepada para penjual yang tidak memiliki izin untuk menjual dengan ditetapkannya hukuman pidana hingga lima tahun penjara dan denda hingga \$250.000. Biro ATF bertugas untuk mengeluarkan peraturan yang mewajibkan *Background Check* untuk pembeli senjata api kelas tertentu dan barang-barang lainnya yang dibeli melalui korporasi atau badan hukum lainnya. ATF juga diharuskan mengeluarkan aturan yang menjelaskan bahwa pedagang senjata api atau pemegang izin yang mengirimkan senjata api memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan penegak hukum jika senjata mereka hilang atau dicuri dalam perjalanan.

Presiden Obama juga berusaha mendorong komunikasi yang lebih besar antara otoritas federal dan negara bagian tentang informasi sejarah kriminal seseorang melalui *Background Check*. Presiden Obama berupaya untuk meningkatkan dialog dengan negara-negara bagian untuk memastikan sistem *Background Check* menjadi komprehensif untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Presiden Obama juga menginstruksikan FBI untuk merombak sistem *Background Check* agar lebih efisien dan akurat. mencakup peningkatan personel, dan memodernisasi NICS untuk mengadakan pemeriksaan *Background Check* secara rutin. Presiden Obama memberikan dana tambahan kepada ATF untuk mempekerjakan 200 agen dan penyelidik ATF baru untuk membantu menegakkan hukum senjata api yang ada. ATF juga diarahkan untuk mendirikan pusat investigasi untuk melacak perdagangan senjata api ilegal yang beredar di Internet(NCSL.org).

Selanjutnya, Presiden Obama meminta jaksa agung untuk mendorong para pengacara federal Amerika untuk bekerjasama dengan otoritas negara bagian dan lokal untuk meningkatkan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) dan untuk mencegah orang-orang yang masuk dalam daftar terlarang untuk memperoleh senjata api. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian utama Presiden Obama, karena menurutnya, kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan oleh anggota keluarga yang tidak memiliki kapabilitas untuk memiliki senjata api dan dibutuhkan penanganan khusus oleh kelompok-kelompok masyarakat termasuk pengacara untuk mencegahnya. Mengacu pada hal tersebut, presiden Obama juga menginvestasikan sebanyak \$500.000.000 untuk meningkatkan akses perawatan kesehatan mental dengan meningkatkan kapasitas layanan dan tenaga kesehatan/medis.(NCSL.org)

Berbicara soal kedua kubu Partai, Demokrat sebagai partai dari Presiden Obama percaya bahwa rasa aman dan tentram dalam bermasyarakat adalah hal yang penting demi hidup yang lebih harmonis. Terbukti sejak dulu dalam berbagai *platform* partainya selalu dominan menunjukkan dukungan terhadap kontrol senjata. Berbagai proposal diajukan untuk memperbaiki hukum kontrol senapan genggam yang disadari membawa bahaya serius khususnya pasca-pembunuhan 1968. Para politisi Democrat percaya bahwa penggunaan senjata api juga sangat berdampak meresahkan sehingga banyak aktifitas para warga yang sehari-harinya tersendat akibat penggunaan senjata ini pada dasarnya Partai Democrat percaya bahwa hidup aman dan tentram merupakan Hak Asasi Manusia yang berhak dinikmati oleh seluruh warga. Meskipun begitu, partai ini tetap mengakui hak para pelaku olahraga senjata yang murni memiliki senjata untuk keperluan berburu dan olahraga menembak(Democrats.org, 2000).

Di tahun 1992 Demokrat menelorkan berbagai program untuk memberantas kejahatan dan narkoba, karena disadari kejahatan tidak hanya sebuah gejala tetapi menjadi penyebab besar dari isu kemiskinan dan demoralisasi yang semakin parah menyerang komunitas dalam kota. Untuk itu, partai ini berjanji untuk menambah

personil polisi di jalan untuk menciptakan ketaatan hukum kembali. Paspembantaian tahun 1999 di SMA Columbine isu senjata api kembali mengemuka menjadi isu politik para kandidat partai. Partai Democrat dalam beberapa dekade terakhir telah mengeluarkan kebijakan soal kepemilikan senjata api, termasuk dalam masa kepemimpinan Barack Obama yang terkenal sangat ketat dalam mengatur regulasi kepemilikan senjata api dengan harapan dapat mengurangi kekerasan senjata, namun tetap menghormati hak-hak pemilik senjata api yang bertanggung jawab. Kebijakan Partai Democrat dalam memiliki senjata api banyak mengatur soal pengecekan latar belakang dan mental setiap calon pemilik senjata api. Menurut Partai Democrat, kesehatan mental dan jiwa pemilik senjata api sangatlah penting agar penggunaan senjata tersebut tetap terkontrol dan mengantisipasi penyalahgunaan yang akan berdampak buruk bagi warga disekitarnya. Democrat juga mengatur dengan ketat soal penjualan senjata api, karena disamping untuk mencegah bentuk penyelundupan, Democrat juga sangat mengantisipasi supaya senjata – senjata tersebut tidak jatuh ke tangan teroris, pelaku kekerasan domestik, dan sindikat kriminal. sebagaimana disebutkan dalam *platform* daring milik Partai Demokrat:

## **2.2 Tragedi Penembakan Massal dalam masyarakat Amerika Serikat**

Kekerasan senjata api mencapai puncak kekhawatiran ketika penembakan massal banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang kemudian memicu debat publik dan tuntutan penyusunan hukum kontrol senjata. Kekerasan senjata api banyak terjadi di tempat-tempat umum yang biasanya menjadi pusat aktifitas manusia. Mulai dari sekolah, perkantoran, taman bermain, hingga pusat perbelanjaan. Dengan motif yang berbeda, para pengguna senjata api yang melakukan tindak kekerasan banyak mendapatkan senjata dan amunisi melalui toko-toko senjata yang dalam beberapa negara bagian dijual secara bebas. Meskipun adanya peraturan pemerintah soal *Background Check* dan pembatasan penjualan senjata api nampaknya tidak berpengaruh banyak dalam menurunkan tindak kekerasan yang sangat sering terjadi dalam 3 dekade terakhir. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin hak dan

keselamatan masyarakatnya dan telah berulang kali memperbaharui/merevisi perundang-undangan kontrol senjata api dan kekerasan senjata api setiap tahunnya.

Namun secara tidak diduga, semenjak perundang-undangan soal kepemilikan senjata api terbentuk di beberapa negara bagian Amerika sangat marak terjadi kasus penyalahgunaan dalam masyarakat dalam berbagai bentuk, yaitu seperti penembakan yang terjadi di Sekolah, Universitas, dan tempat keramaian lainnya. Kasus ini sangat menyita perhatian publik internasional dan sangat menuai kontroversi dimana perhatian publik banyak tertuju pada regulasi atau perundang-undangan soal kepemilikan senjata api.

### **2.2.1 Penembakan Massal di Columbine High School**

Pada 20 April 1999, Dylan Klebold dan Eric Harris (17 tahun) melakukan pembantaian di sekolah mereka, Columbine High School di Jefferson County, Colorado. Keduanya menggunakan bom-bom rakitan, sebuah karabin semi otomatis, sebuah pistol, dan dua senapan laras pendek (sawed-off shotguns). Mereka membunuh 12 siswa dan 1 orang guru serta melukai hampir 20 orang lainnya sebelum kemudian bunuh diri. Salah seorang teman kedua siswa, Robyn Anderson (18 tahun) membeli dua dari empat senjata yang digunakan dalam pembantaian tersebut dari penjual pribadi di Tanner Gun Show, Denver. Anderson mengaku jika seandainya dibutuhkan suatu pemeriksaan latar dia pasti tidak dapat melakukan pembelian tersebut (Valdez dan Ferguson Jr, 2011).

Kasus ini menjadi salah satu contoh dari celah yang terdapat dalam hukum kontrol senjata api sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Valdes dan Ferguson Jr., 2011 juga menjelaskan bahwa pada tahun 1960 dan 1970-an seiring industri senjata api diperluas dan penyalahgunaan senjata meningkat, pameran pistol menjadi populer sebagai tempat untuk menjual senjata api. Sebanyak 2.000 hingga 5.000 pameran pistol diadakan setiap tahun di Amerika Serikat yang mulai menarik perhatian mereka yang ingin membeli senjata api secara anonim. Bahkan meskipun

hukum *The Brady Act* mensyaratkan agar semua penjual senjata berlisensi harus menjalankan pemeriksaan riwayat hidup terhadap semua penjualan, akan tetapi penjual tanpa lisensi masih dapat menjual senjatanya pada saat pameran senjata. Sedangkan di 32 negara bagian pemeriksaan latar tidak diperlukan. *The Brady Law* tidak mengatur tentang penjualan senjata api tangan kedua oleh *non dealer*, sehingga aktivis kontrol senjata api meyakini bahwa dengan adanya pameran senjata maka orang yang tidak memiliki kualifikasi dapat dengan mudah membeli senjata api dan hal ini dapat berakibat bahaya seperti kejadian penembakan massal di SMA Columbine.

Pasca terjadinya tragedi Columbine, Presiden George W. Bush juga mengesahkan *No Child Left Behind Act (NCLB) of 2001, Public Law 107-110* pada 8 Januari 2001. NCLB dimaksudkan untuk mengubah secara radikal tata cara mendidik siswa, yang menekankan perbaikan sistem pendidikan dengan menitikberatkan empat prinsip besar perbaikan: akuntabilitas, pelibatan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan, pengambil keputusan secara lokal dan menggunakan program-program berlandaskan ilmu pengetahuan (Modzeleski, 2007). Menyadari pentingnya perombakan dalam sistem pendidikan Amerika, berbagai institusi pendidikan melakukan langkah-langkah pencegahan dalam meminimalisir kasus kejahatan senjata api yang terjadi di sekolah. Salah satu kekhawatiran tersebut muncul karena banyaknya kasus siswa membawa senjata api ke sekolah. Untuk itu, pemerintah mengesahkan *The Gun-Free Schools Act (GFSA)* pada tahun 1994. Banyak sistem sekolah kemudian mengadopsi *The Zero-Tolerance Law* yang mewajibkan sekolah untuk mengeluarkan siswa dari sekolah jika ditemukan membawa senjata api. Di dalam sebuah survey yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak siswa menjadi takut akan terjadinya serangan di sekolah oleh karena itu lebih banyak siswa dilaporkan terlihat membawa pistol ke sekolah (NSSC, 2006). Banyaknya perubahan signifikan dalam dunia pendidikan Amerika khususnya perbaikan yang menyangkut sistem keamanan sekolah dan tata cara pendidikan anak pasca tragedi Columbine sebagai hasil dari dorongan dan kekhawatiran publik akan keselamatan anak. Akan tetapi,

meskipun banyak perubahan yang dilakukan belum juga mampu mencegah dan melindungi sekolah dari berbagai aksi serangan bersenjata dari luar lingkungan sekolah.

### **2.2.2 Penembakan Massal di Virginia Tech**

Serangan terorisme di lingkungan pendidikan yang terjadi pada tanggal 16 April 2007 di *Virginia Polytechnic Institute and State University*. Kampus tersebut mendapat serangan dari seorang mahasiswa yang bernama Seung Hui Cho, yang diketahui memiliki sejarah gangguan mental. Pelaku menggunakan dua senapan genggam dan mengakibatkan sebanyak 32 mahasiswa dan guru tewas dalam insiden tersebut sedangkan pelaku kemudian tewas bunuh diri. Seung Hui Cho membeli dua senapan genggam secara legal meskipun memiliki latar belakang gangguan emosional yakni pernah mengencani siswi SMP dan oleh hakim diputuskan bahwa ia menderita sakit secara mental dan merupakan bahaya bagi dirinya sendiri. Akan tetapi, nama Seung Hui Cho tidak muncul di dalam daftar federal sebagai orang yang dilarang membeli senapan genggam karena keinkonsistensian negara bagian Virginia dalam melaporkan data tersebut kepada pemerintah federal. Oleh karena itu, meskipun hukum federal *The Brady Law* memerintahkan negara bagian untuk melaporkan data tersebut kepada *The National Instant Criminal Background Check System*, akan tetapi hanya 22 negara bagian saja yang memenuhi aturan tersebut di tahun 2007. Persoalannya adalah laporan tersebut tidak bersifat wajib karena tidak diikuti dengan sanksi tegas bagi negara bagian yang gagal menaati peraturan tersebut. Sekali lagi hal ini menjadi celah dalam hukum kontrol senjata yang ada. Berbulan-bulan pascapenembakan, Virginia kemudian mengundang legislasi baru untuk memperbaiki penyimpanan rekaman data dan praktek laporannya. Selain itu, di awal 2008 Kongres akhirnya mengundang legislasi yang memaksa semua negara bagian untuk menaati persyaratan-persyaratan federal (Spitzer, 2009)

### **2.2.3 Penembakan Massal di Sandy Hook Elementary School**

Kasus penembakan massal di area sekolah yang meningkat tajam di akhir abad ke-20 terus berlanjut hingga abad ke-21. Salah satu kasus yang paling menggegerkan dunia adalah pembantaian di Sandy Hook Elementary School tahun 2012 yang memakan 26 korban termasuk 20 anak-anak. Pelaku pembunuhan Adam Lanza (20 tahun) juga mengakhiri hidupnya dengan senjata setelah aksi brutalnya. Senapan serbu yang digunakan Lanza merupakan senjata legal milik ibunya. Peristiwa ini kembali menjadi contoh bagaimana senjata yang diperoleh secara legal juga berpotensi besar disalahgunakan dalam aksi kejahatan. Berbagai pembantaian massal yang belakangan marak terjadi menandakan bahwa lingkungan pendidikan di Amerika Serikat tidak lagi seaman dulu. Kejahatan senjata api dapat terjadi kapanpun, di manapun, baik di daerah perkotaan, pinggiran kota atau pedesaan sekalipun. Tingginya angka kejahatan senjata api di Amerika menempatkan negara ini pada posisi pertama dalam kasus penembakan di lingkungan pendidikan terbanyak di dunia. Tragedi ini dan yang serupa lainnya memukul kesadaran semua pihak bahwa kemudahan akses senjata api di Amerika merupakan problematika serius yang harus segera ditangani. Berbagai elemen masyarakat mendorong pemerintah untuk menyusun berbagai regulasi baru yang kompleks, yang bahkan tidak pernah ada di masa-masa sebelumnya. Pascatragedi Sandy Hook ribuan orang menandatangani petisi online yang mendesak Gedung Putih untuk segera membahas isu kontrol senjata api melalui penyusunan undang-undang.

Saat itu, Presiden Obama secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mengatur kontrol senapan serbu. Obama mengajukan rangkaian proposal hukum kontrol senjata api, termasuk memperluas pengecekan riwayat hidup. Sayangnya proposal tersebut harus terhalang di kongres yang sebagian besar disebabkan oleh oposisi Republikan (Garden, 2013). Banyak Republikan mengatakan bahwa rencana kontrol senjata tersebut tidak efektif dan juga pelanggaran terhadap hak Amandemen Kedua terkait kepemilikan senjata api. Meskipun terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk menetapkan perundangan yang melarang senapan serbu, akan tetapi



upaya-upaya tersebut selalu gagal dikarenakan dominasi lobi pro hak senjata. Adapun fenomena lain yang berkembang di tengah krisis kejahatan senjata yaitu justru terjadi peningkatan dalam jumlah permintaan senapan serbu setelah Obama mengumumkan niatnya melarang senjata tersebut. Penjualan senjata meningkat drastis di beberapa kota, bahkan senjata yang digunakan Adam Lanza, pelaku penembakan, terjual habis, sehingga agen senjata api mengaku kehabisan stok meskipun telah menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelum penembakan besar tersebut terjadi.

Tragedi ini di satu sisi sangat menyita perhatian publik terutama memunculkan berbagai ide dan saran untuk mencegah kekerasan senjata terjadi di lingkungan sekolah. Salah satunya yang secara khusus diprakarsai oleh NRA yaitu usulan perencanaan dan legislasi untuk mempersenjatai para guru. Seperti berbagai usulan legislasi lainnya, ide inipun menuai kontroversi, terutama karena banyak kekhawatiran dari masyarakat (Bruce, 2012) Meskipun begitu, South Dakota menjadi negara bagian pertama yang mengesahkan hukum secara eksplisit yang memberi kewenangan kepada karyawan sekolah untuk membawa senjata di tempat kerja. Bahkan di beberapa negara lain juga tidak ada pembatasan hukum sehingga memungkinkan para guru untuk memiliki senjata di dalam kelas. *The Harrold Independent School District* di Texas mulai memungkinkan para guru untuk membawa senjata pada tahun 2008, kemudian Utah juga disebut memiliki guru yang membawa senjata di dalam kelas meskipun mereka tidak perlu mengungkapkan secara terbuka para petugas keamanan ini harus melewati pelatihan tambahan khusus untuk mendapatkan izin membawa senjata tersembunyi di sekolah atau universitas mereka. Tidak hanya itu, berbagai perangkat sekolah diciptakan anti peluru, seperti meja anti peluru, pintu dan papan tulis kelas anti peluru. Berbagai perangkat keamanan juga dipasang di sekolah seperti kamera keamanan, metal detector, penjaga sekolah di lorong serta menempatkan petugas keamanan atau polisi secara berkala di sekolah. Banyak perombakan yang dilakukan dalam sistem keamanan sekolah di Amerika (Eligon, 2013). Di sisi lain, ide membolehkan senjata api di sekolah ini ditentang banyak kalangan, khususnya kelompok pro kontrol senjata, mengingat

bahwa kepemilikan senjata api juga memiliki resiko penyalahgunaan ataupun resiko kecelakaan. Selain itu, terdapat berbagai macam resiko dan pertimbangan lainnya, terutama jika tidak tersimpan dengan aman, siswa dapat mengakses senjata tersebut sehingga justru membahayakan.

#### **2.2.4 Penembakan Massal di Wal-Mart El Paso**

Kasus penembakan massal terbesar sepanjang 2019 terjadi di El Paso, Texas. Menurut laporan dari kepolisian El Paso, penembakan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di kota El Paso, Texas, Amerika Serikat pada hari Sabtu, 3 Agustus 2019. Gubernur Texas Greg Abbott dalam konferensi pers melaporkan ada 20 orang yang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah penembakan tersebut. Secara kronologis, Kepolisian El Paso menjelaskan bahwa penembakan tersebut terjadi di pusat perbelanjaan Walmart, Cielo Vista Mall, kota El Paso. Juru bicara Kepolisian El Paso, Robert Gomez mengatakan polisi mulai mendapatkan laporan adanya penembakan pada pukul 10.00 waktu setempat. Gomez mengatakan saat penembakan terjadi diperkirakan ada 3.000 pengunjung dan 100 karyawan yang sedang berada di dalam pusat perbelanjaan Walmart tersebut (Simon, 2019). Greg Abbott juga mengatakan penembakan ini menewaskan 20 orang. Abbott pun menyebut bahwa peristiwa ini merupakan salah satu hari yang paling mematikan dalam sejarah Texas.

Korban dalam kasus penembakan ini telah berhasil diidentifikasi oleh kepolisian El Paso, yakni 3 warga negara Meksiko termasuk di antara korban yang tewas. Selain itu, Kepala Kepolisian El Paso Greg Allen mengatakan setidaknya teridentifikasi ada 26 orang yang terluka ringan hingga parah akibat penembakan ini, dan 3 di antara korban luka merupakan warga negara Meksiko. Setelah penembakan terjadi, polisi menahan seorang pria berusia 21 tahun yang bernama Patrick Crusius dan teridentifikasi sebagai pelaku yang merupakan warga kota Allen di Dallas yang berada sekitar 1.046 kilometer dari El Paso. Dari hasil tangkapan CCTV yang disiarkan di media AS memperlihatkan seorang pria memakai kaos berwarna gelap dan memakai pelindung telinga serta membawa senapan laras panjang atau *Rifle*.

Setelah berita penembakan terdengar hingga FBI, investigasi pun dilakukan untuk mencari adanya motif terorisme domestik terkait penembakan ini. FBI El Paso pun meminta siapa saja yang mengambil foto atau video saat dan setelah penembakan untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Penembakan ini diinvestigasi sebagai pembunuhan, tetapi pihak yang berwajib mengatakan beberapa aspek mengindikasikan adanya kemungkinan penembakan ini merupakan bentuk kejahatan kebencian atau *Hate Crime*. Hal ini dikarenakan polisi menemukan sebuah manifesto berisi ucapan rasis kepada para imigran dan rasa tau golongan Hispanik yang diunggah oleh pelaku ke forum daring 8chan. Manifesto nasionalisme kulit putih dan anti-imigran tersebut berjudul *The Inconvenient Truth*. Dalam manifesto tersebut, penulis mendukung dan terinspirasi oleh penembakan di Christchurch 2017 lalu. Pelaku mengaku termotivasi oleh teori konspirasi genosida kulit putih yang mendorongnya untuk melakukan pembersihan etnis Hispanik di Texas, dan menolak toleransi dan percampuran ras (Li, 2019). Para politisi dan sarjana politik Amerika Serikat menyebutkan isi manifesto tersebut mengulang banyak retorika dan pidato Presiden Trump saat kampanye, di mana dia kerap menyebut para migran Hispanik sebagai bentuk invasi. Trump juga sempat menyebut orang-orang Meksiko dan Amerika Tengah sebagai penjahat, gangster, dan pemerkosa (Li, 2019).

Tanggapan dan simpati mulai dari berdatangan sehari setelah kejadian penembakan tersebut berlangsung. Presiden Donald Trump merespon kasus tersebut dengan mengecam dan mengutuk penembakan tersebut, ia menyebut penembakan itu merupakan tindakan pengecut. Dalam pidatonya, Presiden Trump mengatakan:

*“in one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy.” (Keith dan Naylor, 2019)*

yang mana ia menyatakan menolak adanya rasisme, bigot, dan supremasi kulit putih dalam masyarakat Amerika. Trump mengajukan adanya hukuman mati untuk sang pelaku kepada Department of Justice, disamping itu ia juga menuntut hukuman mati untuk para pelaku kejahatan penembakan massal dan *Hate Crimes* untuk kedepannya. Trump juga menuntut para penegak hukum untuk tidak memberikan

akses kepada para masyarakat yang punya sejarah gangguan mental, karena menurutnya gangguan mental lah yang menyebabkan terjadi penembakan, bukan senjata api. Dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, Presiden Trump mendiskusikan soal bahaya *Video Game* dan Internet sebagai pemantik kekerasan dalam anak muda Amerika Serikat dan ia mendesak untuk menghentikan distribusi *Video Game* dan akses kepada situs Internet yang memantik kekerasan, namun, ia sendiri tidak dapat membuktikan korelasi dua hal tersebut dalam kajian ilmiah.

*"too easy today for troubled youth to surround themselves with a culture that celebrates violence. We must stop or substantially reduce this and it has to begin immediately."*(Keith dan Naylor, 2019)

Wakil Presiden Amerika, Mike Pence justru banyak menyinggung soal gangguan mental dan para aparat yang tidak bisa mengidentifikasi kecenderungan kekerasan oleh orang dengan gangguan mental yang berakar dari emosi yang tidak terkontrol. Ia mendesak para CEO *Social Media* untuk dapat mengidentifikasi adanya intensitas penembakan massal dari para pengguna *Social Media*.

Calon Presiden dari Partai Demokrat Beto O'Rourke yang berasal dari El Paso memutuskan mundur dari forum kepresidenan di Las Vegas dan kembali ke Texas. Respon dari kubu partai Demokrat banyak mencela Trump karena dianggap membuat sentimen nasionalis kulit putih rasis dengan anti-imigran semakin panas. Partai Demokrat mengatakan Trump telah menciptakan iklim politik yang kondusif bagi kekerasan berbasis kebencian. Sementara itu, penembakan ini juga memulai kembali perdebatan tentang kontrol senjata api. Dengan 26 korban, penembakan massal ini adalah penembakan massal paling mematikan ketiga dalam sejarah Texas, dan paling mematikan ketujuh dalam sejarah Amerika Serikat modern. Pada saat peristiwa terjadi, penembakan ini juga yang paling mematikan di tahun 2019, dan paling mematikan di AS setelah penembakan gereja Sutherland Springs di Texas pada 5 November 2017.(Helsel & Rosenblatt, 2019)